

PERAN LOTRE SEBAGAI SARANA AMAL BAGI ANAK-ANAK PANTI ASUHAN PROTESTAN DI SEMARANG TAHUN 1887-1935

Anggita

Ilmu Sejarah, Universitas Airlangga
Email Korespondensi: anggita5748@gmail.com

Diterima: 4 November 2025

Direvisi: 16 Maret 2026

Disetujui: 25 Maret 2026

ABSTRACT

*This study explores the financial instability faced by the Protestant Orphanage in Semarang and the need for adaptive funding strategies, which makes the use of lotteries an important subject of inquiry. It aims to analyze why lotteries were adopted as a philanthropic strategy to overcome financial uncertainty between 1887 and 1935, as well as how this practice contributed to the orphanage's sustainability and development. Using historical method, comprising topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historiography, this research draws on primary sources such as *De Locomotief* and *Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indië*, complemented by newspapers including *Java-Post* and *Het Koloniaal Weekblad*, as well as official reports and books. Founded in 1769, the orphanage became a de facto government institution following the Java War. Although the government assumed responsibility in 1845, its financial support remained unstable due to shifting colonial budget priorities and limited fiscal commitment, leading to recurring shortages. The tension between state responsibility, religious authority, and internal management reached its peak in 1874, repositioning the orphanage as a subsidized private institution. However, traditional fundraising efforts and repeated appeals for increased subsidies failed to resolve its financial constraints. In response, the orphanage turned to lotteries as a pragmatic solution, reflecting a negotiation between colonial administrative practices and religious values. Despite moral objections from religious figures who viewed lotteries as a form of gambling, the government approved a large-scale lottery in 1898 to fund a new building. The initiative not only covered construction costs but also generated significant profit. This study demonstrates how lotteries became a critical mechanism for the orphanage's survival and expansion, revealing the complex interplay between philanthropy, morality, and colonial governance.*

Keywords: Lottery, Charity, Protestant Orphanage, Semarang

PENDAHULUAN

Panti Asuhan Protestan di Semarang adalah sebuah institusi yang didirikan pada tahun 1769 oleh Gubernur Johannes Vos dengan tujuan mulia untuk merawat anak-anak yatim piatu miskin dari kalangan jemaat Kristen. Namun, sejak awal, panti ini sudah terbebani oleh tantangan finansial yang rumit. Meskipun pada akhir 1819 dana diakonia (lembaga amal gereja) masih tercatat melimpah, bunga pinjaman kepada pemerintah kolonial tidak dibayar sejak 1811. Hal ini memicu krisis keuangan yang mencapai puncaknya pada tahun 1830. Ketika panti yang merawat sekitar 70 anak meminta bantuan finansial dari pemerintah, permohonan tersebut secara tegas ditolak berdasarkan Pasal 1 Resolusi No. 48 12 Maret 1831, dengan alasan bahwa pengelola Panti Asuhan belum menyerahkan laporan yang tepat tentang penggunaan dana diakonia.

Penolakan tersebut tidak hanya mencerminkan keterbatasan komitmen pemerintah, tetapi juga menjadi titik awal perubahan signifikan dalam status panti. Situasi ini berkaitan dengan persoalan sosial yang muncul pasca Perang Jawa, terutama meningkatnya jumlah anak terlantar yang lahir dari hubungan antara tentara Eropa dan perempuan pribumi. Hubungan ini dapat dipahami melalui praktik pergundikan, yakni relasi tidak menikah secara resmi yang lazim

terjadi dalam masyarakat kolonial, yaitu laki-laki Eropa hidup bersama perempuan pribumi atau nyai yang umumnya berasal dari lapisan sosial bawah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pendampingan sosial, serta pembentukan kehidupan pribadi. Praktik tersebut tidak hanya mencerminkan ketimpangan rasial dan sosial, tetapi juga menghasilkan konsekuensi serius bagi anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Sejak kecil, banyak dari anak berdarah campuran atau yang disebut "Indo" berada dalam posisi ambigu karena tidak sepenuhnya diterima oleh lingkungan Eropa maupun masyarakat pribumi. Selain itu, relasi yang tidak stabil sering kali menyebabkan anak kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya, baik karena ditinggalkan, dipisahkan, maupun akibat perubahan status sosial sang ayah. Dalam wacana kolonial sendiri, keberadaan anak-anak berdarah campuran ini dipandang secara ambivalen; di satu sisi mereka diakui sebagai bagian dari komunitas, tetapi di sisi lain pertumbuhan jumlah mereka dianggap sebagai persoalan yang perlu dibatasi demi kepentingan kolonial (Wagenvoort, 1910). Pandangan ini menunjukkan bahwa anak-anak hasil pergundikan tidak hanya menghadapi kerentanan sosial dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga ditempatkan dalam posisi problematis dalam struktur kolonial yang lebih luas. Pemerintah menganggap masalah ini sebagai kasus khusus dan memutuskan untuk mengirim anak-anak tersebut ke panti asuhan di Semarang atas usulan dari Residen Kedoe. Maka dari itu, panti asuhan Protestan di Semarang menghadapi peningkatan jumlah anak yang harus ditampung, sekaligus didorong untuk menyesuaikan perannya sebagai respons terhadap dampak sosial dari praktik pergundikan dalam masyarakat kolonial.

Berdasarkan Pasal 2 Resolusi No. 48 12 Maret 1831, ditetapkan bahwa anak-anak tentara yang terlantar di wilayah Kedoe dan sekitarnya harus dikirim ke Semarang untuk diterima serta diasuh oleh lembaga Kongregasi Reformasi dan setiap anak menerima tunjangan sebesar f 6 per bulan dari kas negara. Keputusan ini memicu protes dari Dewan Diaken. Mereka berargumen bahwa panti asuhan seharusnya hanya melayani anak-anak anggota jemaat Kristen, bukan menjadi tempat penampungan anak terlantar. Namun, pemerintah tetap bersikeras dan melalui Resolusi No. 29 27 Juni 1831 menegaskan kembali keputusan yang sebelumnya ditetapkan dalam Pasal 2 Resolusi No. 48 12 Maret 1831, setelah diketahui bahwa panti asuhan masih memiliki kapasitas yang memadai untuk menampung anak-anak yang tidak terurus. Penegasan ini diperkuat oleh pertimbangan yang tercantum dalam premis Resolusi No. 5 6 September 1831 yang memuat pandangan pemerintah Hindia pada masa itu mengenai pemeliharaan kaum miskin, bahwa tidak terdapat alasan untuk menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan (*Protestantsch Weeshuis Semarang*, 1932). Selain itu, pemerintah juga menegaskan bahwa mereka memiliki kewajiban moral untuk menanggung nasib anak-anak yang ditinggalkan ini, bahkan memperluas kebijakan tersebut ke seluruh Hindia Belanda.

Sebagai konsekuensinya, Panti Asuhan Protestan secara bertahap mengalami perubahan status dari lembaga swasta lokal menuju lembaga pemerintah. Peningkatan beban dan tanggung jawab mendorong Dewan Diaken untuk melepaskan pengelolaan panti. Proses ini diperkuat melalui Resolusi No. 14 10 Oktober 1832 yang menetapkan bahwa panti asuhan tidak lagi berada di bawah administrasi Dewan Diaken. Dalam periode setelahnya, panti berfungsi sebagai lembaga yang relatif mandiri, tidak lagi terhubung dengan diakonat, serta memiliki pengelolaan, modal, dan pendapatan sendiri. Perubahan status tersebut kemudian mencapai

bentuk final pada tahun 1845, ketika panti asuhan secara resmi ditetapkan sebagai lembaga pemerintah.

Meskipun pemerintah telah mengambil alih tanggung jawab, komitmen finansial mereka tidak konsisten. Anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi karena jumlah anak yang dirawat terus meningkat. Dewan Audit (*Algemeene Rekenkamer*) bahkan mengkritik keras pengeluaran yang membengkak ini dan mempertanyakan apakah pemerintah memang berniat menanggung biaya anak-anak dari warga sipil. Pemerintah merespons dengan menetapkan batas baru: tidak lebih dari 400 anak yang dapat dirawat atas biaya negara, kecuali dengan izin khusus. Mereka juga mencari cara untuk menekan biaya dan melepaskan kewajiban ini, sehingga panti asuhan kembali tertekan secara finansial.

Ketegangan ini mencapai puncaknya pada 26 Maret 1870, ketika Direktur Pendidikan, Agama, dan Perindustrian, menyimpulkan bahwa panti asuhan telah menjadi lembaga pemerintah selama 40 tahun terakhir dari penelusuran perjalanan sejarah, tetapi dalam praktiknya pemerintah membagi sebagian beban biaya kepada amal publik. Sehingga Direktur Pendidikan, Agama, dan Perindustrian mengusulkan agar panti kembali berstatus swasta dengan subsidi terbatas dari pemerintah. Dewan Hindia Belanda menanggapi usulan tersebut, tetapi harus ada pelonggaran pada bantuan pemerintah yang hanya diberikan sebatas kebutuhan dan apabila benar-benar mendesak, bantuan hanya boleh untuk perawatan dan pengasuhan anak, tidak untuk pendidikan karena sudah ada sekolah umum. Namun, Wakil Presiden Dewan, F. N. Nieuwenhuizen, menolak usulan itu. Menurutnya, keinginan Menteri De Waal adalah agar biaya perawatan anak yatim tidak lagi sepenuhnya ditanggung negara, bahkan sebaiknya dikurangi. F. N. Nieuwenhuizen berpendapat bahwa pemerintah harus tetap menanggung anak-anak tentara karena mereka memiliki kewajiban moral. Perdebatan ini akhirnya menghasilkan kompromi yang tercermin dalam peraturan baru tahun 1874. Meskipun panti dinyatakan sebagai lembaga swasta yang disubsidi, pemerintah tetap membiayai sebagian besar operasionalnya, dengan memberikan subsidi tahunan sebesar f 78.300 (*Protestantsch Weeshuis Semarang*, 1932).

Namun, harapan pemerintah bahwa bantuan amal masyarakat dapat menutupi kekurangan kebutuhan panti tidak terwujud. Pada tahun 1876, pengurus panti mengajukan permohonan kenaikan subsidi pendidikan karena meningkatnya kondisi kerja guru di sekolah negeri menyebabkan panti kesulitan mempertahankan tenaga pengajar tanpa menawarkan imbalan yang lebih kompetitif, tetapi ditolak dengan alasan bahwa panti seharusnya mengandalkan donasi publik. Permintaan tersebut, bersama dengan permintaan izin mengadakan lotre untuk pemasukan kas ditolak pada tahun 1887 dan 1890, pemerintah beralasan panti tidak dalam kondisi keuangan yang mendesak. Rangkaian penolakan ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan finansial panti terus berlanjut.

Pada tahun 1896, kondisi keuangan panti benar-benar memburuk. Gedung lama sudah tidak layak huni, bahkan terjadi wabah beri-beri. Pengurus panti mengajukan dua permohonan mendesak: menaikkan subsidi dan mengizinkan lotre senilai f 300.000 untuk membangun gedung baru. Setelah beberapa penolakan dan permohonan berulang, pemerintah akhirnya menyetujui izin untuk lotre kecil. Namun, kebutuhan untuk membangun gedung baru sebesar f 260.490 tetap tidak terpenuhi.

Berdasarkan laporan dalam *Protestantsch Weeshuis Semarang* (1932), pemerintah memberikan izin untuk lotre besar senilai f 400.000. Meskipun awalnya ragu, pengurus panti terkejut karena penjualan tiket melebihi ekspektasi. Lotre ini tidak hanya berhasil menutupi semua biaya pembangunan gedung baru, tetapi juga menghasilkan keuntungan bersih yang signifikan. Fenomena ini menunjukkan ketegangan antara tanggung jawab moral keagamaan dan rasionalitas ekonomi kolonial. Ketika lembaga keagamaan harus menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi demi keberlangsungan misinya, muncul ruang sosial yang ambivalen di antara moralitas dan pragmatisme.

Dalam kerangka teori hibriditas budaya Homi K. Bhabha, kebudayaan dipahami tidak sebagai sesuatu yang murni, melainkan hasil negosiasi dan penerjemahan nilai antara kekuatan yang berlawanan. Proses ini melahirkan "*Third Space*", ruang antara makna lama dan baru berinteraksi dan membentuk identitas sosial yang hibrid. Bhabha (1994), menegaskan bahwa perubahan sosial tidak muncul dari penolakan total, melainkan dari "*negotiation rather than negation*", yakni perundingan yang melahirkan bentuk sosial baru yang "*neither the one nor the other*". Melalui perspektif ini, penyelenggaraan lotre oleh Panti Asuhan Protestan di Semarang dapat dibaca sebagai bentuk negosiasi antara nilai kolonial dan religius. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mengapa lotre digunakan sebagai strategi filantropi dalam mengelola Panti Asuhan Protestan di Semarang untuk mengatasi ketidakstabilan finansial pada periode 1887-1935 serta bagaimana penyelenggaraan lotre pada tahun 1887-1935 berkontribusi secara konkret terhadap keberlanjutan dan pengembangan Panti Asuhan Protestan Semarang.

Penelitian mengenai lembaga sosial Kristen di masa kolonial dan modern telah banyak dilakukan, tetapi aspek strategi pendanaan spesifik melalui instrumen lotre masih luput dari kajian mendalam. Penelitian Mulyati (2020), mengenai Yayasan Sosial Kristen Salib Putih (YSKSP) di Salatiga lebih menitikberatkan pada sejarah berdirinya yayasan sebagai bentuk warisan sosial penganjil serta peran institusionalnya dalam pelayanan umat. Di sisi lain, Kristiana (2017), dalam studinya tentang Panti Asuhan Santa Theresia Malang, berfokus pada dimensi internal pengelolaan kas yang memiliki nilai-nilai spiritual, sosial, dan keuangan dengan sumber dana utama bergantung pada donatur tetap dan subsidi yayasan. Berbeda dengan kedua studi tersebut yang cenderung melihat pengelolaan panti melalui pendekatan historis-institusional atau etika manajemen kas, penelitian ini hadir untuk mengisi celah (*gap*) terkait penggunaan lotre sebagai strategi filantropi yang pragmatis sekaligus kontroversial di Semarang pada periode 1887-1935.

METODE PENULISAN

Metodologi penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk menganalisis peran lotre sebagai strategi filantropi. Menurut Kuntowijoyo (2005), tahapan yang dilalui meliputi pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.

Pemilihan topik ini tidak hanya berangkat dari kedekatan emosional dan intelektual terhadap fenomena lotre sebagai praktik amal di era kolonial, tetapi juga didorong oleh urgensi akademik untuk mengisi kekosongan kajian mengenai mekanisme pendanaan non-konvensional dalam sejarah filantropi. Selama ini, penelitian tentang lembaga sosial kolonial lebih banyak menekankan peran negara dan institusi keagamaan secara normatif, sementara

praktik yang berada di wilayah ambivalen seperti lotre cenderung diabaikan karena dipandang problematis secara moral. Padahal, justru dalam ambiguitas tersebut terlihat bagaimana berbagai pihak merumuskan strategi adaptif untuk menjawab keterbatasan struktural.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya mengungkap bagaimana ketidakstabilan dukungan finansial dari pemerintah mendorong lahirnya inovasi yang tidak sepenuhnya selaras dengan norma religius, tetapi tetap dapat dinegosiasikan dalam praktik. Lotre tidak sekadar menjadi alat penggalangan dana, melainkan ruang negosiasi antara moralitas, kebutuhan ekonomi, dan kebijakan kolonial. Hal ini penting karena memperlihatkan bagaimana sistem sosial kolonial bekerja secara pragmatis di luar kerangka formal.

Daya tarik utama topik ini terletak pada perspektifnya yang tidak konvensional. Lotre dipahami bukan hanya sebagai instrumen ekonomi atau penyimpangan moral, tetapi sebagai praktik yang memiliki dimensi simbolik dan politis. Dapat dibaca juga sebagai bentuk performativitas filantropi yang tidak hanya menghasilkan dana, tetapi juga membangun legitimasi sosial lembaga. Dengan demikian, topik ini tidak hanya memenuhi kriteria 5W+1H, tetapi juga menawarkan sudut pandang baru dalam memahami dinamika filantropi dan tata kelola sosial di masa kolonial.

Pada tahap heuristik, sumber-sumber dikumpulkan dari surat kabar sezaman seperti *De Locomotief* (1926, 1935), *De Locomotief: Samarangsch Handels en Advertentie-blad* (1882, 1898a, 1898b, 1899), dan *Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indië* (1935). Selain itu, sumber artikel seperti *Java-Post* (1906) dan *Het Koloniaal Weekblad* (1918), serta beberapa buku dan laporan-laporan resmi juga digunakan untuk mendapatkan data yang komprehensif.

Setelah sumber terkumpul, tahap verifikasi dilakukan untuk mengkritisi otentisitas dan kredibilitasnya. Kritik eksternal memastikan keaslian dokumen, sementara kritik internal membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk mencari inkonsistensi.

Tahap interpretasi menjadi inti dari penelitian, data yang telah diverifikasi dianalisis untuk memaknai mengapa lotre digunakan sebagai strategi filantropi. Analisis ini menghubungkan kondisi keuangan panti yang tidak stabil dengan hasil lotre, menunjukkan bahwa lotre adalah solusi pragmatis untuk mengatasi krisis pendanaan.

Terakhir, pada tahap historiografi, hasil penelitian disusun menjadi narasi sejarah yang koheren. Laporan akhir menjelaskan secara sistematis mengapa dan bagaimana lotre berfungsi sebagai sarana amal, memberikan pemahaman mendalam tentang praktik filantropi yang unik dalam konteks sosial dan politik kolonial di Semarang.

Metodologi ini menekankan pentingnya keterkaitan antara peneliti dengan topik penelitiannya, serta keakuratan dan keaslian sumber yang digunakan. Dengan mengikuti metodologi ini, peneliti dapat menghasilkan karya sejarah yang tidak hanya informatif tetapi juga memiliki kedalaman analisis dan interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Sosial Pengasuhan Anak di Semarang 1887-1935

Kehidupan sosial masyarakat Semarang pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 mencerminkan kompleksitas masyarakat kolonial yang sarat ketimpangan rasial, ekonomi, dan moralitas sosial. Dalam struktur masyarakat Hindia Belanda, anak-anak menjadi bagian dari persoalan sosial yang memperlihatkan batas antara kekuasaan, agama, dan ekonomi kolonial.

Sejak abad ke-18, lembaga-lembaga pengasuhan anak seperti Panti Asuhan Protestan di Semarang berperan penting dalam mengatur nasib anak-anak yatim piatu dari kalangan Eropa dan Indo-Eropa. Namun, keberadaan lembaga ini tidak terlepas dari diskriminasi rasial yang tajam dan kebijakan sosial yang berpihak pada kelompok berstatus Eropa.

Salah satu ciri khas pengasuhan anak pada masa kolonial adalah adanya pemisahan tegas antara perawatan anak-anak Eropa dan anak-anak pribumi. Gereja Protestan mendirikan panti asuhan pertama di Batavia sejak 1629 untuk menampung anak-anak Eropa dan Eurasia yang kehilangan orang tua. Pola yang sama diikuti di Semarang pada 1769, ketika Panti Asuhan Protestan didirikan untuk menampung anak-anak dari perkawinan campuran antara laki-laki Eropa dan perempuan pribumi. Dalam konteks kolonial, anak-anak berdarah campuran ini dipandang penting untuk mempertahankan eksistensi komunitas Eropa di Hindia Belanda, sekaligus menjaga simbol superioritas budaya Barat. Anak-anak yang dididik secara Kristen dan berperilaku sesuai nilai-nilai Eropa dianggap dapat “diangkat” ke dalam status sosial Eropa, terlepas dari asal-usul ibunya yang pribumi.

Pada masa itu, agama berperan lebih kuat dibanding ras dalam menentukan status sosial seseorang. Hingga diberlakukannya *Regeeringsreglement* tahun 1847 dan pembaruan pasal 109 tahun 1919, seluruh pemeluk Kristen di Hindia Belanda dikategorikan sebagai “Eropa” dalam hukum kolonial (Dirks, 2011). Maka dari itu, anak-anak hasil hubungan antara pria Eropa dan perempuan pribumi yang diakui secara sah oleh ayahnya serta dididik dalam lingkungan Kristen dapat memperoleh status hukum Eropa. Karena itu, pengasuhan dan pendidikan anak-anak tersebut menjadi urusan penting bagi gereja dan pemerintah kolonial yang ingin menjaga ketertiban sosial serta citra moral bangsa penjajah.

Namun, realitas sosial di lapangan jauh lebih kompleks. Banyak anak Indo-Eropa yang lahir dari hubungan di luar nikah atau ditinggalkan oleh ayah mereka terutama serdadu kolonial yang kembali ke Eropa atau meninggal dalam tugas. Dari tahun 1815 hingga 1909, tercatat sekitar 150.000 tentara Eropa datang ke Hindia Belanda (Dirks, 2011). Sebagian besar memiliki pasangan pribumi atau *njai* yang melahirkan anak-anak tanpa status hukum yang jelas. Ketika para ayah ini meninggalkan anak-anaknya, tanggung jawab pengasuhan jatuh pada lembaga-lembaga gereja seperti Panti Asuhan Protestan di Semarang. Situasi ini diperburuk oleh krisis ekonomi, terutama krisis gula pada akhir abad ke-19 yang meningkatkan angka kemiskinan dan jumlah anak terlantar di kota-kota besar Jawa.

Dalam konteks itulah pemerintah kolonial mulai memberikan perhatian terbatas terhadap lembaga-lembaga pengasuhan anak. Pemerintah menetapkan bahwa sebanyak 200 anak dapat dirawat di panti asuhan dengan biaya f 6 per anak setiap bulan yang dibayar dari kas negara (*Protestantsch Weeshuis Semarang*, 1932). Anak-anak yang melebihi jumlah tersebut dari luar wilayah Semarang dapat diterima oleh Residen Semarang. Namun, pihak penerima tetap berkewajiban untuk meminta otorisasi dari pemerintah guna pembiayaan lanjutan. Maka dari itu pihak panti asuhan menetapkan beberapa kategori yang dapat diterima, yaitu:

- a. Anak-anak Protestan yang lahir dari pernikahan sah antara ayah Eropa (atau yang dipersamakan dengan Eropa) dan ibu Eropa (atau yang dipersamakan dengan Eropa) yang salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan yang tidak dapat dibiayai oleh orang tua yang masih hidup.

- b. Anak-anak Protestan yang lahir di luar nikah dari ayah Eropa dan ibu pribumi atau ibu Kristen yang telah diakui oleh ayahnya dan yang karena berbagai alasan diinginkan oleh ayahnya untuk dirawat di panti asuhan.
- c. Anak-anak dari orang tua Protestan yang telah meninggal dunia dan harta peninggalannya dikelola oleh Dewan Perwalian, wali, atau pengelola warisan.
- d. Anak-anak dari orang tua Protestan yang dibiayai oleh Dewan Diaken atau lembaga amal.

Klasifikasi tersebut mencerminkan cara pandang kolonial yang menempatkan pengasuhan anak dalam kerangka moral dan rasial. Anak-anak yang memiliki hubungan darah Eropa dianggap perlu dijaga dan “diselamatkan” dari kemiskinan agar tidak terjerumus ke dalam lingkungan pribumi yang dianggap menurunkan martabat ras Eropa. Oleh sebab itu, lembaga seperti Panti Asuhan Protestan tidak hanya berfungsi sosial, tetapi juga menjadi alat pemeliharaan hierarki sosial kolonial. Pemerintah kolonial menggunakan lembaga ini untuk memastikan bahwa anak-anak berdarah campuran tetap berada di bawah pengawasan nilai-nilai Kristen dan disiplin Eropa, sementara anak-anak pribumi dibiarkan dalam struktur sosial tradisional mereka tanpa campur tangan negara.

Meski pemerintah menyediakan subsidi, jumlahnya tidak pernah cukup untuk menutupi biaya operasional. Subsidi yang terbatas dan birokrasi yang kaku membuat pengurus panti harus mencari sumber pendanaan alternatif. Pada saat yang sama, ide tentang *pauperism* atau kemiskinan sosial mulai berkembang di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial menilai kemiskinan terutama di kalangan Indo-Eropa sebagai ancaman terhadap wibawa kolonial. Namun, tanggapan terhadap persoalan ini bersifat ambivalen: pemerintah mengakui masalah sosial tersebut, tetapi tidak bersedia menanggung sepenuhnya biaya pemeliharaan lembaga sosial. Kebijakan yang diambil adalah mendorong filantropi swasta melalui gereja dan organisasi masyarakat, sementara negara hanya memberikan bantuan terbatas sebagai pelengkap.

Kondisi sosial ini menciptakan situasi paradoks. Di satu sisi, gereja Protestan merasa memiliki kewajiban moral untuk merawat anak-anak yatim dari jemaatnya; di sisi lain, sumber daya finansial gereja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Ketimpangan antara ideal moral Kristen dan realitas kolonial yang menuntut efisiensi ekonomi melahirkan bentuk-bentuk filantropi baru yang lebih pragmatis, yaitu lotre (Rees, 1902).

Lotre sebagai Strategi Filantropi dalam Mengelola Panti Asuhan Protestan di Semarang untuk Mengatasi Ketidakstabilan Finansial 1887-1935

Lotre telah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendanai kegiatan amal, terutama bagi lembaga-lembaga yang biayanya tidak bisa ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Selama bertahun-tahun, izin mengadakan lotre uang menjadi satu-satunya bentuk dukungan pemerintah bagi lembaga asuh swasta atau keagamaan, seperti panti asuhan yang tidak bisa memperoleh dana dari kas negara.

Pada April 1876, pengurus Panti Asuhan Protestan di Semarang mengajukan permohonan agar subsidi pendidikan dinaikkan sebesar f 6.000 per tahun. Namun, permintaan itu ditolak. Melalui keputusan No. 37 22 Juli 1876, pemerintah menegaskan kembali bahwa panti asuhan

adalah lembaga swasta yang hanya menerima subsidi dari pemerintah dan jika membutuhkan dana tambahan, pengurus dianjurkan mencari dukungan dari donasi masyarakat.

Tentu saja pemerintah memiliki sumber dana lain untuk membantu mereka yang membutuhkan. Melalui Staatsblad dibentuk "*Centrale Commissiën van Weldadigheid*" atau Komisi Sentral Amal yang bertugas membantu orang Kristen miskin. Pada 1886, ruang lingkup kerja lembaga ini diperjelas dan namanya diubah menjadi "Komisi untuk Mendukung Orang Kristen yang Membutuhkan", dengan cabang di Batavia, Semarang, Surabaya, dan Padang (Faber, 1935).

Komisi Sentral Amal mengumpulkan uang dari 1% hasil lelang besar pemerintah atas produk dan barang dagangan lainnya, serta dari lelang barang-barang dengan nilai lebih dari f 10.000. Hasil pungutan ini dibagi di antara komisi dengan ketentuan Batavia menerima 5/12, Semarang 2/12, Surabaya 3/12, dan Padang 2/12. Pemasukan dari seluruh wilayah kerjanya meliputi 1% dari semua penjualan umum, juga dari penyewaan dan pengelolaan terbuka, serta dari lotre dengan nilai f 10.000 atau kurang (disebut "lotre kecil") dan kolekte dari pejabat catatan sipil pada saat pengumuman serta pelaksanaan pernikahan. Sumber dana lain dapat berupa sumbangan amal yang diterima langsung. Komisi juga memperoleh pendapatan bunga dari modal yang dialokasikan kepada mereka. Modal ini berasal dari pengembalian pungutan 1% dari lelang kopi di Padang pada 1864-1884 yang sebelumnya secara keliru masuk ke kas negara.

Meskipun terdapat sumber dana dari kas negara, panti asuhan di Semarang tetap harus mencari cara lain. Pada keputusan No. 10 21 September 1880, pengurus panti mendapat izin bersama dengan Direksi Schouwburg Batavia untuk menyelenggarakan lotre sebesar f 300.000. Dengan hasilnya dibagi dua untuk kedua lembaga.

Namun, pengajuan lotre tidak selalu mudah. Pada Maret 1887, ketika pengurus panti kembali mengajukan izin lotre senilai f 300.000, permohonan itu ditolak lewat keputusan No. 16 7 September 1887. Pemerintah beralasan panti tidak dalam kondisi keuangan yang mendesak. Permintaan lanjutan pada No. 16 20 Agustus 1890 juga ditolak dengan alasan yang sama.



Gambar 1. Iklan Lotre Panti Asuhan Protestan Semarang dan Direksi Schouwburg Batavia (De Locomotief: Samarangsche Handels en Advertentie-blad, 1882)

Berdasarkan laporan dari *Protestantsch Weeshuis Semarang* (1932), beberapa tahun kemudian, kondisi keuangan panti benar-benar memburuk. Pada 6 Juni 1896, pengurus mengajukan dua permohonan: pertama, agar subsidi pemerintah yang sejak 1874 berjumlah f 38.780 per tahun dinaikkan menjadi f 54.600; kedua, izin lotre senilai f 300.000 yang diharapkan menghasilkan sekitar f 100.000 untuk membangun gedung baru. Permintaan kedua dianggap paling mendesak karena gedung lama di Heerenstraat sudah tidak layak akibat wabah beri-beri dan kondisi yang buruk.

Biaya renovasi bangunan lama ditambah pembangunan dua gedung baru diperkirakan f 90.000. Dana ini hanya bisa diperoleh dari lotre f 300.000. Maka, pada 6 Maret dan 5 Mei 1897, pengurus kembali meminta izin lotre, bahkan meminta prioritas di atas lembaga lain. Namun, pemerintah menolak memberi prioritas. Dalam keputusan No. 50 1 Juni 1897, mereka hanya diberi janji bahwa permohonan akan dicatat dan dipertimbangkan bersama permintaan lain.

Akibatnya, pengurus mengajukan permohonan baru pada 4 September 1897: (1) tambahan dana f 6.000 untuk kebutuhan panti tahun 1897 dan (2) bantuan maksimal f 160.000 untuk membangun gedung baru beserta sekolah dan perabot. Permintaan pertama kemudian diubah menjadi izin mengadakan lotre kecil sebesar f 10.000. Permintaan ini disetujui pada No. 21 9 Januari 1898. Namun, pada 4 April 1898, pengurus kembali melaporkan kekurangan dana. Residen Semarang mengusulkan pinjaman tanpa bunga f 18.000, tetapi akhirnya pemerintah hanya memberi bantuan sebesar f 3.000 lewat keputusan No. 2 7 Agustus 1898, ditambah subsidi f 7.000.

Melihat kondisi ini, muncul pertanyaan bagi pemerintah, apakah ada cara lain untuk mengumpulkan dana tanpa harus selalu mengandalkan kas negara? Ada dua pilihan yang muncul sebagai alternatif. Pertama, memberlakukan pajak khusus untuk penduduk Eropa demi kesejahteraan sosial. Namun, ide ini dianggap tidak bijak mengingat masyarakat Hindia Belanda menentang keras penerapan pajak pribadi pada tahun 1878. Bahkan, sebagian orang kaya langsung menghentikan sumbangan amal mereka karena pajak tersebut. Kedua, mendirikan sistem lotre negara yang hasilnya murni untuk tujuan amal dan menghentikan lotre swasta besar yang selama ini dijalankan (Rees, 1902).

Meskipun lotre sering mendapat keberatan moral di Belanda karena dianggap sebagai bentuk judi yang tidak pantas dikelola negara dan lotre yang diadakan adalah lotre kelas yang dilakukan bertahap, lotre negara di Hindia Belanda bisa dirancang secara berbeda. Tujuannya harus murni amal. Seluruh keuntungan bersih dari lotre harus disalurkan untuk membantu orang miskin, tanpa ada keuntungan yang masuk ke kas negara. Sebaliknya, pemerintah justru akan kehilangan pendapatan dari pajak lotre swasta sebesar 6% dan biaya bea materai. Namun, kehilangan ini sebanding dengan manfaatnya. Walaupun pada akhirnya pertentangan juga terjadi di Hindia Belanda. Berdasarkan artikel *Het Koloniaal Weekblad; Orgaan Der Vereeniging Oost En West* (1918), H. C. G. Ruttink, seorang guru dan penginjil, serta L. Borst, direktur sekolah zending di Bandung, menyatakan bahwa lotre termasuk dalam kategori perjudian. Menurut Ruttink dan Borst, lotre melibatkan pembelian kupon dengan harga rendah untuk memenangkan hadiah dengan nilai yang jauh lebih besar. Mereka berargumen bahwa, terlepas dari tujuannya yang bersifat amal atau keagamaan, partisipasi dalam lotre dapat menumbuhkan sifat suka berjudi dan menjauhkan seseorang dari nilai-nilai spiritual. Namun

jika lotre dihapuskan, pemerintah harus menanggung seluruh kebutuhan lembaga amal melalui kas negara yang biayanya jauh lebih besar daripada pendapatan pajak dari lotre swasta.

Lotre negara dianggap lebih unggul dan efisien daripada lotre swasta karena beberapa alasan. Dari segi efisiensi dan pengawasan, izin lotre swasta sering kali memakan waktu lama sehingga merugikan lembaga amal seperti Panti Asuhan Protestan di Semarang, sedangkan lotre negara dikelola langsung oleh pemerintah serta diawasi oleh Dewan Pusat Kesejahteraan sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, dari segi alokasi dana, dana yang diperoleh dari lotre swasta sering tidak merata sehingga satu lembaga dapat memperoleh dana berlebihan sementara lembaga lain tidak memperoleh apapun, sedangkan melalui lotre negara dana dapat dikelola dan dialokasikan secara lebih adil kepada lembaga yang membutuhkan. Di samping itu, dari segi kepercayaan publik, dalam beberapa tahun terakhir kepercayaan masyarakat terhadap lotre swasta mengalami penurunan sehingga pengelolaan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan keyakinan bahwa dana digunakan secara tepat. Lebih lanjut, dari segi potensi keuntungan, lotre negara diperkirakan mampu menghasilkan keuntungan bersih yang lebih besar untuk amal, yaitu sekitar f 40.000 untuk setiap f 100.000 dibandingkan dengan f 35.000 yang dihasilkan oleh lotre swasta.

Dengan potensi keuntungan bersih tahunan sebesar f 200.000 dari lotre senilai f 500.000, lotre negara bisa menjadi solusi yang kuat dan berkelanjutan untuk membantu banyak lembaga amal dan program pengentasan kemiskinan, termasuk Panti Asuhan Protestan di Semarang yang telah lama berjuang mendapatkan dana. Masyarakat tidak dipaksa membeli tiket, tetapi bagi yang mau berpartisipasi, ada jaminan bahwa lotre dikelola dengan baik dan hasilnya sepenuhnya untuk tujuan amal (Rees, 1902).

Kontribusi Penyelenggaraan Lotre terhadap Keberlanjutan dan Pengembangan Panti Asuhan Protestan di Semarang 1887-1935

Laporan media dari *De Locomotief: Samarangsch Handels en Advertentie-blad* (1898a), menggarisbawahi kondisi sulit panti asuhan saat itu. Penulis Justus Van Maurik yang memuji panti asuhan Katolik karena "kerapian dan keteraturan", dianggap mengabaikan Panti Asuhan Protestan yang "harus bertahan dengan bangunan buruk yang tidak layak pakai dan dalam keadaan sangat miskin". Perbandingan ini secara tidak langsung menunjukkan kebutuhan mendesak panti akan dana yang tidak bisa dipenuhi oleh subsidi semata.

Kesulitan tersebut semakin nyata ketika surat kabar *De Locomotief: Samarangsch Handels en Advertentie-blad* (1898b), menyoroti permohonan panti untuk mendapatkan dana f 160.000 dari kas negara guna pembangunan gedung baru secara resmi ditolak. Namun, dalam keputusan yang sama, pengurus panti justru diberi izin untuk menyelenggarakan lotre berhadiah sebesar f 400.000, dengan syarat seperempat dari hasil bersihnya harus diserahkan kepada Ikatan Perawat Surabaya. Lotre ini dijadwalkan dimulai pada 1 Januari 1899 dengan total 40.000 lembar tiket seharga f 10 per lembar dan harus diselesaikan paling lambat 31 Desember 1899.

f 400.000.— f 400.000.—

GELDLOTERIJ
„PROTESTANTSCH E WEE SHUIS“ TE SEMARANG.

Hoofdprijs f 100.000.—
TREKKING 30 December 1899.

@ f 10.10 per Lot. dus f 10.30 per Lot; op voldoende
0.20 francoes-kosten. francoeur letten a. v. p.
Postwinstels van plaatsgele to voorzien.

Met het oog op den naderenden trekkingstermijn, geven wij bijgaande gemakkelijke
wijze van bestelling aan.

Loten verkrijgbaar bij:
VAN HARTEN & Co. te Semarang.
VAN BUUREN & Co. te Batavia.
J. A. HARTEN & Co. te Soerabaja.
S. HISSINK te Djoeja.
Notaris HAZENBERG te Semarang.

SEMARANG. datum postmerk.
VAN HARTEN & Co.
Administrateurs der Loterij P. W.

den 1899.

den Heeren
te

De ondergeteekende verzoekt toezending van Loten i/d Loterij v/b
Protestantsche Weeshuis te Semarang, waarvoor hierbij remise @ f

(a)

(a) Handteekening
Naam, voorletters; kortom adres duidelijk te
vermelden.

**Gambar 2. Iklan Lotre Panti Asuhan Protestan Semarang Tahun 1899
(De Locomotief: Samarangsche Handels en Advertentie-blad, 1899)**

Hasil lotre jauh melebihi perkiraan. Awalnya, pengurus khawatir banyak tiket tidak laku sehingga hanya bisa mendapat keuntungan f 24.000, padahal butuh f 120.000. Ternyata penjualan melampaui ekspektasi. Bahkan panti memenangkan hadiah dari tiket tak terjual senilai f 115.000. Setelah membagikan seperempat hasil f 55.962,27 kepada organisasi “*Soerabajasche Ziekenverpleging*”, keuntungan bersih lotre mencapai f 168.374,17. Penjualan gedung lama juga menghasilkan f 49.236, lebih tinggi dari perkiraan f 40.000.

Meski begitu, biaya pembangunan gedung baru melebihi rencana. Awalnya diperkirakan f 240.000, lalu naik jadi f 250.000, tetapi akhirnya mencapai f 260.490,94. Sementara tambahan f 1.697,34 harus dicadangkan untuk penyelesaiannya secara menyeluruh. Izin ini menjadi bukti konkret pertama bahwa lotre dapat menjadi solusi substansial untuk proyek pengembangan besar panti.

Sekitar delapan tahun kemudian, artikel *Java-Post*; *Weekblad van Nederlandsch-Indië*, (1906), memuat kebijakan penghematan yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal saat itu memangkas subsidi panti asuhan yang dinilai sebagai “kesalahan politik yang tidak dapat dibenarkan”. Panti Asuhan Protestan di Semarang, misalnya, kehilangan subsidi sebesar f 10.000, sementara panti asuhan Katolik yang menampung lebih dari 300 anak terancam bangkrut karena permohonan mereka untuk menaikkan subsidi diabaikan. Kondisi ini membuat para pengelola panti asuhan mendesak pemerintah untuk segera mengambil keputusan terkait usulan yang telah diajukan komisi penyelidikan empat tahun sebelumnya.

Merespons desakan ini, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengemukakan pandangannya mengenai sistem bantuan sosial, meskipun kebijakan ini masih bersifat sementara. Pada dasarnya, Gubernur Jenderal menilai bahwa sistem subsidi tetap bagi lembaga

sosial tidak efektif sehingga perlu dihentikan dan sebagai gantinya besaran subsidi harus ditentukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan riil. Selain itu, mekanisme lotre tahunan juga perlu diubah, sehingga hasilnya tidak lagi diberikan kepada satu atau dua lembaga tertentu, melainkan dialokasikan kepada sebanyak mungkin lembaga yang membutuhkan. Dalam kerangka tersebut, pemerintah tetap memberikan izin penyelenggaraan lotre besar tahunan kepada lembaga tertentu, tetapi lembaga tersebut hanya diperbolehkan menerima dana sesuai kebutuhan, sementara sisa hasil bersih lotre akan dimasukkan ke dalam dana khusus yang digunakan untuk membantu lembaga lain yang kekurangan. Dana ini tidak harus dihabiskan dalam satu tahun, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih besar di masa mendatang, seperti pembangunan gedung. Meskipun kebijakan ini berpotensi menimbulkan keberatan karena dianggap menghambat pembentukan modal cadangan oleh lembaga amal, Gubernur Jenderal berpendapat bahwa keberadaan modal cadangan justru dapat merugikan lembaga lain. Oleh karena itu, subsidi tetap yang dihapus akan dicatat sebagai dana awal dan kemudian digabungkan dengan sisa hasil lotre untuk dikelola secara kolektif.

Pemerintah juga menyarankan agar pengelolaan dana ini diserahkan kepada lembaga baru. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai dewan khusus yang mengelola dana mandiri atau sebagai penasihat pemerintah. Tugas dewan ini adalah menilai lembaga mana yang berhak menerima bantuan dan menentukan alokasi dana subsidi serta hasil lotre setiap tahun. Pada tahap awal, dewan ini akan bersifat sementara, beranggotakan pejabat pemerintah dan perwakilan masyarakat. Jika terbukti efektif, dewan tersebut dapat diresmikan menjadi lembaga permanen.

Dalam artikel *Het Koloniaal Weekblad; Orgaan Der Vereeniging Oost En West* (1918), lotre uang telah mendapat izin dari pemerintah untuk diselenggarakan oleh perkumpulan Seri Roediman di Weltevreden, dengan nilai total f 500.000. Dari hasil bersih lotre ini, Panti Asuhan Protestan Semarang mendapatkan 3/20 dari hasil yang dibagikan.

Puncak dari peran lotre terjadi pada tahun 1926. Berita di surat kabar *De Locomotief* (1926), melaporkan bahwa lotre besar berikutnya akan diadakan khusus untuk kepentingan Panti Asuhan Protestan di Semarang. Lotre ini memiliki total 100.000 tiket seharga f 10 per lembar, sehingga total pemasukan mencapai satu juta gulden. Dari jumlah tersebut, f 500.000 dialokasikan untuk hadiah dan setelah dikurangi biaya operasional, panti asuhan diperkirakan akan menerima 60% atau sekitar f 300.000 dari sisa dana. Ini adalah jumlah yang sangat besar dan persetujuan dari Direktorat Kehakiman menjadi kabar gembira bagi pengurus panti. 40% sisanya dibagikan kepada berbagai organisasi lain seperti Pro Juventute, Rumah Sakit Borromeus, dan perkumpulan amal lainnya di Hindia Belanda.

Hampir satu dekade kemudian, pola penggalangan dana lewat lotre dan kegiatan sosial kembali tampak, tetapi dalam bentuk yang lebih sederhana. *De Locomotief* (1935), memberitakan perkumpulan *Protestantsch Geestelijk Leven* (P.G.L.) atas nama jemaat Protestan di Semarang merencanakan penyelenggaraan sebuah bazar pada 3 Oktober 1935 di salah satu aula Gedung Loge di Pontjol. Acara ini ditujukan untuk mengumpulkan dana demi perayaan Natal bersama warga jemaat yang kurang mampu serta anak-anak miskin.

Dalam persiapannya, kelompok ibu-ibu dan remaja putri P.G.L. telah membuat berbagai kerajinan tangan yang akan dijual. Selain itu, anak laki-laki peserta kursus Slöyd juga

menyumbangkan hasil ukiran dan pahatan kayu mereka. Tidak hanya jemaat di Semarang, jemaat dari Blora turut memberikan dukungan. Panitia pun mengajak seluruh umat Protestan untuk ikut serta, baik dengan mengirimkan barang-barang yang layak dijual maupun menghadiri bazar bersama keluarga.

Pada hari pelaksanaan, bazar dibuka pukul lima sore dengan sambutan singkat dari ketua P.G.L. yang menyampaikan rasa terima kasih kepada anggota jemaat, para pendukung dari luar kota, serta kantor dagang dan toko-toko yang berkontribusi. Di dalam gedung, tersedia 13 meja yang penuh dengan beragam barang, mulai dari karya sloyd, kerajinan tangan, hingga hiasan dinding. Koleksi yang ditampilkan berhasil menarik perhatian pengunjung. Anak-anak yang hadir dimanjakan dengan berbagai permainan seperti grabbelton, lempar gelang, tarik tali, pohon konfeti, dan stan memancing. Selain itu, tersedia pula makanan, minuman, serta poppenkamer, permainan menebak boneka yang banyak diminati. Suasana semakin meriah seiring bertambahnya pengunjung yang memenuhi aula.

Puncak acara berlangsung pukul delapan malam ketika lotre lotere dilakukan di bawah pengawasan polisi. Tiket lotere dijual seharga f 0,50 dan hasil lotrenya diumumkan melalui iklan di surat kabar. Permainan poppenkamer dimenangkan oleh Nona Bekhout dari Karangasem, sedangkan boneka berhasil ditebak oleh Nona Fleur Pendrian.

Menurut laporan *Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië* (1935), bazar beserta lotre tersebut menghasilkan pemasukan kotor sekitar f 1250. Atas nama jemaat Protestan yang membutuhkan, panitia menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya. Dana yang terkumpul akan dipakai untuk memberikan jamuan khusus dalam perayaan Natal mendatang bersama kaum prasejahtera dan anak-anak miskin.

SIMPULAN

Lotre menjadi instrumen finansial yang krusial bagi lembaga amal di Hindia Belanda, terutama Panti Asuhan Protestan di Semarang yang menghadapi keterbatasan subsidi pemerintah. Penolakan awal pemerintah terhadap permohonan lotre menunjukkan bahwa mekanisme ini tidak langsung dianggap sebagai kebutuhan mendesak. Namun, memburuknya kondisi keuangan mendorong perubahan sikap tersebut, hingga lotre akhirnya diterima sebagai solusi praktis untuk mendukung operasional dan pengembangan panti, termasuk pembangunan gedung baru.

Di sisi lain, penerapan lotre memunculkan perdebatan moral di kalangan tokoh agama yang menganggapnya sebagai bentuk perjudian. Meskipun demikian, tekanan kebutuhan finansial membuat pemerintah mulai mempertimbangkan pembentukan lotre negara sebagai alternatif yang lebih terpusat dan terdistribusi. Skema ini dipandang mampu mengalokasikan dana secara lebih merata kepada berbagai lembaga sosial tanpa berorientasi pada keuntungan negara, sekaligus menghindari dominasi lembaga tertentu.

Dalam praktiknya, efektivitas lotre terlihat sejak 1898 ketika penyelenggaraan lotre senilai f 400.000 menghasilkan keuntungan bersih f 168.374,17, melampaui ekspektasi awal meskipun biaya pembangunan meningkat. Perkembangan ini berlanjut pada 1906 saat pemangkasan subsidi pemerintah justru memperkuat posisi lotre sebagai alternatif pendanaan, bahkan mendorong gagasan sistem lotre negara. Puncaknya terjadi pada 1926 ketika Panti Asuhan Protestan menjadi penerima utama lotre senilai satu juta gulden dengan estimasi

keuntungan bersih f 300.000. Memasuki 1935, lotre tidak hanya hadir dalam skala besar, tetapi juga bertransformasi menjadi praktik penggalangan dana lokal seperti bazar P.G.L. yang berhasil menghimpun f 1.250 untuk kegiatan sosial.

Temuan ini menunjukkan bahwa lotre tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana darurat, melainkan berkembang menjadi mekanisme strategis yang menopang keberlanjutan lembaga sosial di tengah ketidakpastian kebijakan kolonial. Lebih jauh, praktik ini juga mencerminkan negosiasi yang dinamis antara tuntutan moral religius dan kebutuhan pragmatis ekonomi, sekaligus memperlihatkan bagaimana filantropi dapat beroperasi sebagai praktik yang tidak hanya ekonomis tetapi juga simbolik.

Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa inovasi finansial dalam konteks filantropi kolonial tidak dapat dipisahkan dari dimensi sosial, moral, dan representasi publik. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, kajian dapat diarahkan pada pendekatan yang lebih eksploratif, seperti melihat lotre sebagai bentuk performativitas filantropi yang membangun legitimasi sosial melalui praktik publiknya atau menempatkannya sebagai embrio sistem kesejahteraan sosial awal (*proto-welfare system*) sebelum terbentuknya mekanisme negara modern. Selain itu, penelitian juga dapat dikembangkan melalui pemetaan jaringan aktor dan distribusi dana guna mengungkap relasi kekuasaan yang lebih luas, serta menelaah dimensi emosi dan persepsi masyarakat terhadap lotre untuk memahami bagaimana praktik ini dinegosiasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari.

REFERENSI

- Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië. (1935, October 3). *Bazaar P. G. L.*
- Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture*. Routledge.
- De Locomotief: Samarangsch Handels en Advertentie-blad. (1882, June 24). *Geld-Loterij*.
- De Locomotief: Samarangsch Handels en Advertentie-blad. (1898a, January 13). *I drukken van een Tòtòk van Justus Van Maurik*.
- De Locomotief: Samarangsch Handels en Advertentie-blad. (1898b, August 11). *Raad van Justitie*.
- De Locomotief: Samarangsch Handels en Advertentie-blad. (1899, October 16). *Geldloterij „Protestantsche Weeshuis" Te Semarang*.
- De Locomotief. (1926, November 10). *Een Loterij Voor Het Protestantsche Weeshuis*.
- De Locomotief. (1935, September 7). *P.G.L. BAZAAR. Voor Kerstfeest der bedeeden en arme kinderen*.
- Dirks, A. (2011). For the Youth: Juvenile Delinquency, Colonial Civil Society and the Late Colonial State in the Netherlands Indies, 1872-1942. In *Leiden University*.
- Faber, G. H. von. (1935). *Nieuw Soerabaia*. Perpustakaan Universitas Leiden.
- Het Koloniaal Weekblad; Orgaan Der Vereeniging Oost en West*. (1918, February).
- Java-Post; Weekblad van Nederlandsch-Indië*. (1906, September).
- Kristiana, M. M. D. (2017). Keutamaan Kristiani dalam Implementasi Pengelolaan Kas. *Ekobis*, 22(1), 68–79. <https://dx.doi.org/10.17977/um042v22i1p68-79>
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang.
- Mulyati. (2020). Dinamika Yayasan Sosial Kristen Salib Putih (YSKSP) di Kota Salatiga Tahun 1901-1977. *Pangadereng*, 6(2), 300–313. <https://doi.org/10.36869/pjhpish.v6i2.151>
- Protestantsch Weeshuis Semarang*. (1932). Masman & Stroink.

- Rees, D. F. W. van. (1902). *De Staatsarmenzorg voor Europeanen in Nederlandsch-Indië*. Landsdrukkerij.
- Wagenvoort, M. (1910). *Nederlandsch-Indische Menschen En Dingen*. H. J. W. Becht.